

## **PANCASILA DALAM PRAKSIS SOSIAL: “MANUSIA PANCASILA” MENJAWAB PERMASALAHAN MASYARAKAT DIGITAL**

**M. Rodinal Khair Khasri**

Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada  
Jl. Olahraga, Caturtunggal, Depok, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten  
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281  
Email: m.rodinal.k@mail.ugm.ac.id

### ***Abstract***

*This article departs from the problems of the digital society as indicated by the hoax phenomenon which is epistemic and ethical problems. These two problems are rarely studied in research or scientific writing about hoaxes. This article offers the concept of "Manusia Pancasila" as a nomenclature of Pancasila values that represents the human ideal in processing knowledge and considers the consequences of knowledge in the social sphere as ethical matter. The construction of "Manusia Pancasila" is based on a "monodualist" ontology, socio-epistemology, local knowledge, local morals, Pancasila morals, and religious morals. In the end, the implementation of "Pancasila Man" was directed at the formulation and evaluation of policies in the government and school sectors. Through this implementation, it is hoped that there will be continuity between fundamental reference values, policy formulation and evaluation, and the educational activities both in the formal and informal sectors.*

**Keywords:** *Epistemic; Etics; Hoax; Manusia Pancasila.*

### **Abstrak**

Artikel ini berangkat dari permasalahan masyarakat digital yang diindikasikan oleh fenomena hoax yang merupakan permasalahan epistemik dan etis. Kedua permasalahan tersebut sangat jarang dikaji dalam penelitian maupun tulisan ilmiah tentang hoax. Dengan demikian artikel ini menawarkan konsep “Manusia Pancasila” sebagai nomenklatur nilai-nilai Pancasila yang merepresentasikan ideal manusia di dalam mengolah pengetahuan dan mempertimbangkan konsekuensi dari pengetahuan pada ranah sosial sebagai perkara etis. Konstruksi “Manusia Pancasila” berpijak pada ontologi monodualis, sosio-epistemologi, pengetahuan lokal, moral lokal, moral Pancasila, dan moral agama. Pada akhirnya, implementasi “Manusia Pancasila” diarahkan pada formulasi dan evaluasi kebijakan pada sektor pemerintah dan sekolah. Melalui implementasi ini, diharapkan ada kesinambungan antara nilai acuan yang bersifat fundamental, formulasi dan evaluasi kebijakan, dan penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar pada sektor formal maupun informal.

**Kata Kunci:** Epistemik; Etis; Hoax; Manusia Pancasila.

#### **A. Pendahuluan**

Seiring perkembangan teknologi informasi yang kian pesat, kita dihadapkan pada kondisi yang dilematis yakni antara keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan.

Di satu sisi, ketersediaan informasi yang sangat melimpah dan akses publik yang sangat mudah akan dapat membuka wawasan masyarakat tentang kondisi terkini kehidupannya. Namun di sisi lain banyak

yang mencemaskan keterbukaan informasi—meliputi akses dan penyediaan yang tak terbatas—akan dapat memperumit permasalahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu permasalahan pelik yang perlu diperhatikan yaitu kemunculan hoax sebagai akibat dari minimnya kemampuan literasi, khususnya literasi digital. Hoax merupakan bagian dari permasalahan masyarakat digital dan menjadi salah satu permasalahan penting yang tidak boleh dianggap remeh. Hoax sebagai kata kerja merupakan tindakan meyakinkan orang untuk percaya atau menerima sesuatu yang salah dan tidak masuk akal sebagai sebuah kebenaran (*Merriam-Webster*, n.d.).

Kemampuan mengolah informasi pada tataran individu sangat berpengaruh bagi kemunculan hoax. Akar permasalahan hoax ada pada tataran epistemik yang berhubungan dengan proses konstruksi pengetahuan dari data mentah (*raw materials*) yang diperoleh dari kanon-kanon pengetahuan, terutama media informasi digital yang sangat mudah diakses. Dalam praktiknya, mendapatkan dan menyebarkan informasi jauh lebih mudah dibandingkan dengan literasi terhadap informasi atau pemahaman atas isi informasi tersebut.

Di era pandemi covid-19 ini, masyarakat sangat rentan terpapar hoax. Kepercayaan bahwa covid-19 adalah konspirasi merupakan pijakan historis yang sangat tepat untuk digunakan sebagai titik tolak mengkaji fenomena hoax yang berkembang di Indonesia. Kemunculan teori konspirasi di saat momen pandemi bukanlah hal baru (Imhoff & Lamberty, 2020). Jauh sebelum pandemi Covid-19, kampanye yang cenderung bersifat hoax pernah dilakukan oleh *Soviet Committee for State Security* bahwa penyakit HIV adalah senjata biologis Amerika Serikat (Geissler & Sprinkle, 2013) dan dampak dari HIV yaitu AIDS dipercaya sebagai upaya genosida terhadap orang-orang kulit hitam (Bogart et al., 2010). Menguatnya kepercayaan masyarakat tentang teori konspirasi sangat didukung

oleh kondisi krisis (van Prooijen & Douglas, 2017) sebagaimana krisis yang menimpa dunia akibat dari pandemi Covid-19. Merujuk pada paparan Bogart dan van Prooijen di atas, teori konspirasi sangat memungkinkan sebagai titik tolak penyebaran hoax yang berbasis kepada sentimen politik tertentu yang pada akhirnya berkedudukan kontraproduktif dengan upaya membangun kehidupan bangsa Indonesia yang aman dan tenteram.

Melanjutkan tesis di atas, pengkajian yang kontekstual terhadap hoax sangat diperlukan terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hoax sebagai permasalahan epistemik dengan demikian harus dikaitkan dengan ideal pengetahuan yang melandasi kehidupan warga negara. Adapun ideal pengetahuan yang dimaksud yaitu ideal pengetahuan yang digali dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus filsafat hidup bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila dapat disebut sebagai sistem pengetahuan yang semestinya dijadikan bahan pertimbangan di dalam proses pengolahan informasi yang dapat mencegah hoax. Implikasi dari pernyataan itu bahwa pengetahuan pada tataran individu maupun kolektif harus disertai dengan pertimbangan etis karena pengetahuan itu tidak bebas nilai dan senantiasa tidak dapat dilepaskan dari aspek praktis.

Pancasila sebagai sistem pengetahuan merepresentasikan salah satu elemen penting dalam kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara yaitu penalaran. Selain itu, terdapat dua elemen lainnya yang juga saling berkesinambungan yakni penghayatan, dan pengaplikasian. Berangkat dari hal itulah, melalui artikel ini, peneliti hendak merekonstruksi pijakan pengetahuan yang tepat untuk merespons hoax. Rekonstruksi itu diarahkan pada upaya merumuskan jawaban atas permasalahan epistemik dalam fenomena hoax, di mana jawabannya berupa rumusan sosio-epistemologis yang bersifat holistik. Holistisitas tersebut bermakna bahwa pengetahuan tidak akan pernah bebas

nilai dan akan selalu berkesinambungan dengan praksis sosial. Oleh sebab itu, konstruksi pengetahuan tersebut akan diimplementasikan ke dalam langkah strategis pencegahan hoax melalui sektor pendidikan, khususnya pendidikan karakter. Tawaran ini merupakan penegasan bahwa hoax sebagai permasalahan epistemik berkesinambungan dengan permasalahan etis yang bergulir di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kesatuan Pancasila dalam Ontologi Monodualis**

Di dalam mengilmiahkan Pancasila, Notonagoro menawarkan sebuah konsep yang ia sebut sebagai monodualis. Konsep itu merupakan landasan ontologis pengembangan pengetahuan maupun keilmuan yang disandarkan pada Pancasila. Dalam hal pengembangan pengetahuan tentang Pancasila, konsep monodualis hadir sebagai perekat, penegas, dan penjelas bahwa kelima sila Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak berdiri sendiri secara atomis/soliter maupun melebur menjadi satu kesatuan yang organis. Argumentasi tentang kesatuan Pancasila—bukan sebagai yang atomis maupun organis—didasarkan pada manusia karena manusia merupakan subjek sekaligus objek Pancasila. Artinya, semua sifat-sifat dan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila akan selalu diarahkan dan dilekatkan pada manusia. Manuialah yang menjadi dasar kesatuan Pancasila, di mana di dalam Pancasila tersimpul hal-hal mutlak yang dimiliki manusia. Adapun hal mutlak tersebut adalah bahwa manusia terdiri dari tubuh dan jiwa, merupakan pribadi yang tidak bisa melepaskan diri secara penuh dari sosialitas, sebagai individu sekaligus makhluk sosial, memiliki kehendak bebas sekaligus sebagai makhluk

Tuhan (Notonagoro, 1995). Pengandaian semacam itu sangat mungkin untuk digunakan untuk merespons permasalahan yang berkembang dalam tradisi strukturalisme, khususnya pandangan yang memahami struktur sebagai hal yang mengekang, membatasi, dan membentuk, sehingga elemen-elemen di dalamnya tunduk pada aturan main struktur.

Melalui tawarannya itu, Notonagoro hendak memoderasi pandangan dualisme di dalam memahami hubungan tiap sila Pancasila. Pandangan dualisme yang paling sering digunakan yaitu dualisme Cartesian yang memilah secara jelas antara jiwa sebagai yang esensial dengan aspek ketubuhan, di mana premis utama yang dijadikan sebagai titik tolak adalah *cogito ergo sum* yakni sebuah pernyataan tentang aktivitas berpikir sebagai hal yang tak tersangsikan dan sekaligus sebagai penegas bahwa pikiran sebagai substansi terpisah dari tubuh atau materi (Swinburne, 2018). Pendekatan yang dualistik sesungguhnya tidak tepat di dalam memahami Pancasila. Alasan utamanya karena hubungan tiap sila adalah melampaui individualitas-kolektivitas, atomis-organik, dan pembagian yang mendemarkasi antara elemen satu dengan elemen lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tiap sila saling terhubung di dalam suatu hubungan hirarkis-piramidal dialogis, di mana sila pertama menjiwai keempat sila di bawahnya. Begitupula sila pertama mengandung keempat sila lainnya, dan berlaku pula bagi sila-sila lainnya.

Dikarenakan kedudukan kodrat manusia sangat penting bagi pemahaman tentang Pancasila, maka Pancasila secara langsung juga sebangun dengan kodrat manusia yang

tersusun atas tubuh dan jiwa sebagai kesatuan, sifat individual dan sosial sebagai kesatuan, serta memiliki kehendak bebas sekaligus sebagai terikat oleh aspek Ketuhanan yang mengikat. Oleh sebab itulah kemudian dapat dikatakan bahwa Pancasila memiliki sifat dasar kesatuan, berupa dua sifat kodrat manusia yang tidak saling mendemarkasi dengan ketat, yang disebut sebagai monodualis (Notonagoro, 1995). Konsep itulah yang menjadi pijakan ontologis di dalam memahami dan mengontekstualkan Pancasila sebagai modal implementatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **2. Pancasila, *Indigenous Knowledge* dan Praksis Sosial**

Sub bahasan ini sekiranya akan menarik jika diawali dengan sebuah pertanyaan eksistensial tentang relevansi prinsip-prinsip Pancasila yang diasumsikan sebagai *meja statis* dan *leitstar dinamis* dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia, atau sejauh mana nilai Pancasila dapat signifikan di dalam menopang kehidupan bangsa Indonesia. Asumsi tersebut dapat dipahami sebagai entitas yang mempunyai kadar kemutlakan sebagai modal ideologis yang secara substantif tidak berubah, namun di samping itu dinamis di dalam merespon perubahan zaman. Namun, ada yang menarik di dalam menyoal kembali relevansi tersebut yaitu tesis yang diajukan oleh Agus Wahyudi (2010) bahwa generalisasi prinsip dasar Pancasila dapat mengarah pada suatu keunggulan dan kelemahan. Semuanya tergantung pada bagaimana orang Indonesia menginterpretasikan Pancasila berdasarkan pembacaannya atas sejarahnya sendiri, serta pada bagaimana orang Indonesia di dalam menangkap tantangan-tantangan perkembangan zaman. Tesis itulah

yang relevan dengan persoalan yang menjadi tantangan asumsi mendasar tentang kemutlakan Pancasila dalam tataran fundamental dan keluwesannya di dalam pertemuannya dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia.

Agar dapat merealisasikan keunggulan dari adanya nilai Pancasila, perlu terlebih dahulu dan secara prioritas menempatkan Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia khususnya dalam perannya sebagai pandangan hidup dan cara pikir bangsa. Stok pengetahuan yang terdapat dalam kanon pengetahuan lokal yang khas dan unik (*local indigenous knowledge*) merupakan representasi dari keseluruhan sila Pancasila. Bangsa Indonesia merupakan kausa materialis dari Pancasila (Kaelan, 2009). Artinya, jauh sebelum Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara, nilai-nilai di dalamnya telah lebih dulu dipraktikkan dalam kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan lokalitasnya masing-masing. Hal itulah yang sekiranya tepat disebut sebagai *local indigenous knowledge*. Menurut Flavier, *Indigenous knowledge* terbentuk dan dicapai dalam konteks lokalitas namun juga dinamis dalam perkembangannya. Selain itu juga dibentuk berdasarkan pengaruh dari pengembangan intelektual internal dan melalui interaksi dengan elemen eksternal (Cuaton & Su, 2020).

Dengan demikian, mengimplementasikan Pancasila tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan lokalitas dengan segala keunikannya. Implementasi yang bersifat kontekstual tersebut kemudian mengarah pada pembentukan pengetahuan (*knowledge making*) di mana pengetahuan yang terbentuk tidak sama dengan pengetahuan yang didapat dengan merekam sejarah secara pasif (Marchand, 2010). Oleh

sebab itu corak pengetahuan sebagai hasil dari implementasi yang kontekstual yaitu pengetahuan yang memiliki aspek konstruktif dan kreatif (Barber & Jackson, 2015). Hal ini juga berhubungan dengan tesis Agus Wahyudi di atas bahwa pemahaman dan implementasi Pancasila tidak dapat dilepaskan dari konteks historisitas (Wahyudi, 2010) yang berbasis pada lokalitas. Pancasila sebagai filsafat bangsa yang digali dari setiap lokalitas dari Sabang sampai Merauke harus dipahami sebagai suatu sistem filsafat yang bersifat luwes di dalam mengakomodir filsafat yang berbasis lokal. Keluwesan ini inheren di dalam asumsi mendasar tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang dalam waktu bersamaan mengandung kadar kemutlakan yang statis dan sekaligus peka dengan perkembangan zaman.

### **3. Manusia Pancasila Sebagai Landasan Rancangan Pendidikan Karakter**

Implementasi Pancasila pada praksis sosial semestinya diarahkan pada konstruksi model sosial di dalam menyikapi permasalahan sosial yang ditanggap sebagai permasalahan kolektif. Model sosial bermakna sebagai kerangka pikir yang menjadi acuan di dalam praksis sosial. Dalam konteks Indonesia, model sosial diidealkan melalui pelibatan nilai-nilai Pancasila sebagai rujukan fundamental. Oleh sebab itu, model sosial yang dimaksud di sini yaitu model sosial Pancasila yang mengacu pada ideal "Manusia Pancasila." "Manusia Pancasila" bukanlah sebagai murni individu melainkan juga merepresentasikan kesatuan bangsa Indonesia sebagai identitas kolektif yang diikat oleh cita-cita bersama untuk mencapai keadaan yang adil dan makmur. Tujuan adil dan makmur

menuntut adanya persyaratan badaniah dan ruhaniah serta material dan spiritual mental, di mana semuanya telah ada di dalam bumi Indonesia dan di dalam *qolbu* rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur sesungguhnya telah ada dan berkobar menjadi keyakinan bangsa Indonesia sejak beratus-ratus tahun yang lalu sebagaimana yang tertuang dalam pepatah Jawa seperti *Gemah ripah loh jinawi* dan *tata tentrem kerta raharja* (PSP UGM dan Yayasan TIFA, 2008).

Model sosial semacam ini membutuhkan wadah internalisasi dalam rangka penguatan kesadaran kebangsaan. Wadah itu tidak lain adalah pendidikan yang dalam keperluan artikel ini dispesifikkan ke dalam pengembangan dan penguatan pendidikan karakter. Adapun internalisasi model sosial di atas, membutuhkan pijakan filosofis yaitu Pancasila. Mempromosikan filsafat sebagai bagian penting dalam proses pendidikan berpengaruh secara signifikan bagi perkembangan peserta didik yang praksis sosialnya berbasis pada moralitas tertentu (Reeve, 2012). Hal ini sangat relevan dengan konteks masyarakat Indonesia yang memiliki latarbelakang moralitas yang kuat.

Oleh sebab itu, memposisikan Pancasila sebagai filsafat bangsa, di samping sebagai dasar dan ideologi negara, sangat berguna di dalam upaya penguatan pendidikan karakter, di mana modal intelektual dan sosial masyarakat terutama para peserta didik telah diperoleh dan dibentuk dalam ranah yang lebih privat seperti keluarga dan komunitas adat, sehingga tidak menyulitkan di dalam membentuk karakter "Manusia Pancasila." Hal tersebut juga sebagai penegasan bahwa menginternalisasikan nilai Pancasila melalui pendidikan karakter tidak sama dengan indoktrinasi nilai

“Asing” yang sulit diterima, melainkan merupakan internalisasi nilai yang pada dasarnya telah ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, internalisasi nilai Pancasila dapat disebut sebagai upaya revitalisasi jati diri bangsa.

“Manusia Pancasila” sebagaimana merujuk pada konsep monodualis yang ditawarkan oleh Notonagoro mencakup dualitas badan dan jiwa, individu dan sosial, serta kebebasan dan kebutuhan. Kesadaran sebagai *outcome* dari implementasi Pancasila adalah manusia Indonesia yang sadar dengan tantangan, ancaman, dan permasalahan bangsa baik secara moral, politik maupun sosial tanpa mereduksi keunikannya sebagai manusia yang bebas dan otonom. Hal inilah yang membedakan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki falsafah hidup dan digerakkan oleh ideologi Pancasila dengan bangsa lain yang digerakkan oleh ideologi seperti komunisme dan sosialisme di mana otonomi individu ditanggihkan kepada kekuasaan negara.

Oleh karena itu, di dalam merumuskan konsep dan cita-cita nasional, bangsa Indonesia tidak meniru atau mengekor pada ideologi-ideologi dominan yang ada di dunia (Latif, 2015). Tiap bangsa mempunyai cara berjuangya sendiri, mempunyai karakternya sendiri. Oleh sebab itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri yang unik. Kepribadian itu terwujud dalam kebudayaan dan perekonomian, dan dalam wataknya sebagai bangsa Indonesia (Soekarno, 1958). Bahkan, Soekarno pernah dengan tegas membantah pendapat Bertrand Russel yang membagi dunia ke dalam dua poros berdasarkan Deklarasi Kemerdekaan Amerika (*Declaration of American*

*Independence*) dan Manifesto Komunis. Soekarno menegaskan bahwa Indonesia tidak dipimpin oleh kedua paham itu atau dengan kata lain tidak mengikuti paham komunias maupun liberal (Latif, 2015). Keunikan bangsa Indonesia yang demikian, sebagaimana diidealkan dalam “Manusia Pancasila” dapat berperan konstruktif bagi pembangunan bangsa di era digital. Jika hipotesis bahwa manusia Indonesia saat ini minim dalam hal literasi digital benar, maka itu menunjukkan bahwa ada latensi manusia berdimensi satu (*One Dimensional Man*) di dalam sosialitas bangsa Indonesia. Manusia berdimensi satu dalam hemat Herbert Marcuse meliputi melemahnya kemampuan di dalam menangkap dan memahami dimensi lain di dalam masyarakat (Marcuse, 2007). Dimensi lain itu dalam pola sosial masyarakat digital adalah dimensi riil dari aktivitas sosial manusia di dalam realitas konkret, termasuk konsekuensi moral setiap tindakan di dunia maya dalam realitas empiris. Maka dari itu, segala aktivitas sosial melalui *platform* digital seharusnya tidak mereduksi manusia menjadi manusia berdimensi satu yaitu berdimensi maya dan anonim. Artinya, segala aktivitas sosial dalam dunia digital tetap memiliki konsekuensi moral, sosial, dan politik yang sama sebagaimana sosialitas di dalam realitas konkret.

#### **4. Kerangka Pikir Penguatan Pendidikan Karakter**

Nilai-nilai yang inheren di dalam konsep “Manusia Pancasila” akan selalu berkaitan dengan sumber utamanya yaitu Pancasila yang mengakar dalam bangsa Indonesia sebagai akar ontologisnya. Di dalam diskursus akademik, khususnya dalam riset literatur tentang kemanusiaan dan

ilmu sosial banyak yang mengkritisi dan keberatan dengan ketagorisasi seperti *indigenous knowledge* dan *traditional ecological knowledge* dan hal-hal lain yang berkaitan dengan lokalitas (Ellen, n.d.; Lepofsky, 2009; Robbins, 2003). Kritikan tersebut mengacu pada pertimbangan politik, tuntutan birokratis, dan tuntutan tentang kejelasan motivasi etis di dalam pelibatan dan pengimplementasian *local indigenous knowledge* (Barber & Jackson, 2015). Dengan kata lain, para kritikus meragukan kapasitas dan kredibilitas aspek lokalitas di dalam perumusan langkah strategis pembangunan yang sebagian besar digerakkan oleh paradigma yang positivistik dan mengacu secara ketat pada aturan baku ilmiah.

Kritikan semacam itu harus direspons secara serius yaitu dengan menawarkan gagasan pemikiran yang paradigmatis guna mensistematisasikan khazanah lokal (*local wisdom*) agar dapat dipahami dan dikonteskan di dalam persaingan maupun perdebatan paradigmatis dalam dunia akademik. Pada sub-bahasan keempat ini, hendak dijelaskan tentang bagaimana nilai yang abstrak dalam konsep "Manusia Pancasila" dapat dijembatani dan dihubungkan dengan langkah strategis upaya Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Dalam konteks konstitusi Indonesia, Penguatan Pendidikan Karakter diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal. Di dalam pasal itu dijelaskan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab

satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi oleh hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) (Indonesia, 2018).

Pada Pasal 2 ayat 1 dijelaskan tentang pelaksanaan PPK dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum (Indonesia, 2018).

Mengenai prinsip PPK dalam pendidikan formal, dijelaskan dalam Pasal 3. Adapun prinsip-prinsipnya sebagai berikut: a) berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu, b) keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan, c) berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari (Indonesia, 2018). Selanjutnya pada Pasal 5 Ayat 1 dijelaskan bahwa PPK pada satuan pendidikan formal diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi: a) sekolah, b) keluarga, dan c) masyarakat (Indonesia, 2018).

Selain pada sektor pendidikan formal, penerapan PPK juga sangat

memungkinkan untuk berlangsung secara kondusif pada sektor non-formal. Dalam Pasal 1 ayat 3, satuan pendidikan non-formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Indonesia, 2018).

Jika dilihat dari poin-poin yang terkandung dalam butir-butir pasal di atas, diperlukan penyempurnaan holistisitas pemahaman tentang definisi dan tujuan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Penyempurnaan tersebut berpijak pada pemahaman tentang peserta didik dengan merujuk pada konsep “Manusia Pancasila” yang didasarkan pada ontologi monodualis. Di samping itu juga diarahkan untuk merespons permasalahan masyarakat digital yang salah satunya diindikasikan oleh fenomena hoax sebagai permasalahan epistemik dan etis.

Konsep “Manusia Pancasila” hadir sebagai tawaran holistik di dalam menyikapi fenomena hoax. Hoax hadir sebagai kerancuan berpikir—ketidakmampuan subjek (individu) di dalam mengolah informasi menjadi pengetahuan—yang berdampak secara sosial. Dampak tersebut bersifat etis dan dapat memicu iklim disharmoni dan perenggangan solidaritas sosial. Adapun tawaran holistik tersebut berupa pijakan filosofis Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang menyentuh dua ranah yaitu epistemologis dan etis.

Pada momen epistemik, konstruksi pengetahuan (*making knowledge*) tidak seharusnya direduksi pada tujuan instrumentalisme dan pragmatisme saja. Pengetahuan pada dasarnya tidak akan pernah secara utuh terisolasi di dalam kepala individu. Pengetahuan atau momen epistemik akan selalu

berkesinambungan dengan momen etis sebagai konsekuensi eksistensial kehadiran pengetahuan di dalam sosialitas.

Secara eksistensial, manusia tidak dapat menghindari dari koeksistensinya dengan manusia lain sehingga perguliran pengetahuan ada pada dua ruang sekaligus yaitu ruang privat yang berkaitan dengan pemenuhan hasrat keingintahuan individual dan ruang publik (*public sphere*) di mana pengetahuan-pengetahuan lintas-subjek saling bertemu dan kemudian bersinggungan dengan konsekuensi epistemik dan etis dari kolektivitas. Artinya, kebenaran pengetahuan lebih bersifat intersubjektif dan dialogis, serta pengetahuan akan berhadapan dengan rambu-rambu etis kolektif.

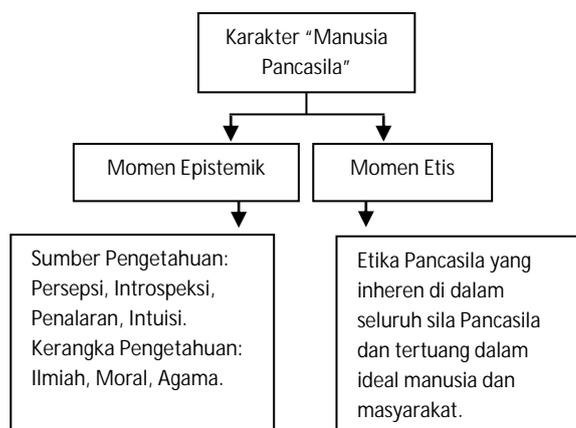
Dengan demikian, “Manusia Pancasila” di dalam momen epistemik dapat mengolah informasi secara komprehensif dan radikal. Keluasan pertimbangan dan kedalaman penalaran menjadi dua kata kunci di dalam mencapai keberhasilan implementasi “Manusia Pancasila.” Masih dalam pengolahan informasi, “Manusia Pancasila” sebagai suatu karakter yang khas, tidak terburu-buru di dalam menjustifikasi kebenaran suatu informasi sebagai anasir pembentuk pengetahuan yang valid secara penalaran yang mencakup koherensi logis dan korespondensi empiris. Justifikasi kebenaran itu tidak boleh hanya berpangku pada acuan positivistik seperti logika formal, logika matematika, dan penalaran empirisme naif. Lebih dari itu, harus juga melibatkan khazanah lokalitas di mana konfigurasi logis dan empiris berbeda dengan apa yang ada di dalam tradisi positivisme, terlebih positivisme logis. Perbedaannya terletak pada pelibatan meta-rasional, meta-logis, dan meta-empiris. Ketiga

term tersebut dapat ditemukan dalam sistem pengetahuan dalam filsafat nusantara yang dominan dengan metafisika. Salah satu contohnya pengandaian tentang realitas yang melampaui realitas empiris, seperti pandangan monisme-spiritualistik sebagai anti tesa monisme-materialistik. Pada pengandaian tentang kebenaran pengetahuan, logika dan rasionalitas Barat perlu dikesampingkan dulu karena dalam filsafat nusantara, kebenaran itu juga melibatkan intuisi-transendental yang bersifat mistik, seperti olah rasa dan oleh batin dalam tradisi filsafat Kejawan.

Pada momen etis, informasi yang didapat dari media digital diolah dengan mengacu dan mempertimbangkan konsekuensi justifikasi pengetahuan pada level publik. Artinya, pengetahuan yang dijustifikasi sebagai yang benar, tidak hanya mempertimbangkan kepuasan hasrat keingintahuan individual, melainkan juga mempertimbangkan dampak dari pengetahuan itu di dalam sosialitas. Pertimbangan ini adalah bagian dari apa yang disebut sebagai sosio-epistemologi, yaitu pengetahuan yang bernafaskan kemanusiaan dan berwatak sosial.

Jika dianalogikan, Sosio-epistemologi lahir dari rahim filsafat kritis—sejak zaman Immanuel Kant dengan rasio kritisnya sampai Hegel dan kaum strukturalis Prancis—di mana filsafat Karl Marx sebagai bidang yang membantu proses persalinannya (Watloly, 2016). Sosio-epistemologi mencapai kematangannya dikarenakan sumbangsih teori kritis di dalam menyatukan teori dengan praksis. Teori kritis memiliki tujuan utama yaitu tujuan praksis untuk menghilangkan aspek represif realitas sosial. Mazhab Frankfurt adalah representasi terbaik teori kritis yang

secara tegas menolak demarkasi positivistik antara fakta dengan nilai (Collin & Pedersen, 2015). Melalui teori kritis dan filsafat kritis, pengetahuan tidak akan pernah dilepaskan dari jangkar etisnya yaitu bahwa pengetahuan yang berkembang dalam dunia sosial tidak akan pernah berstatus bebas nilai. Hal ini juga berlaku bagi pengembangan ilmu pengetahuan.



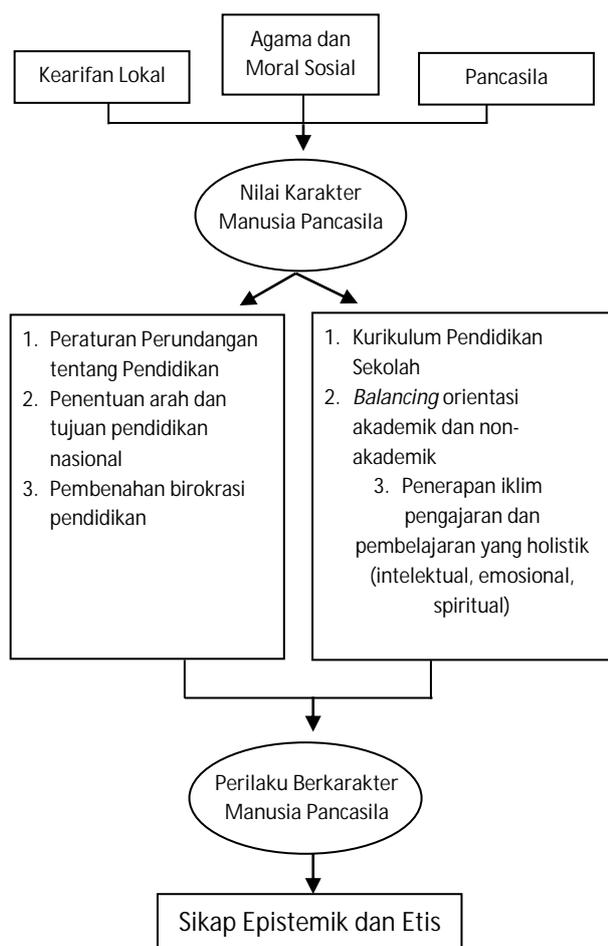
Skema 1. Karakter “Manusia Pancasila”

### C. Simpulan

Peserta didik yang telah menjiwai dan memiliki karakter “Manusia Pancasila” akan dapat kritis di dalam mengolah informasi. Sikap kritis itu dituangkan ke dalam sikap moral dan perilaku moral. Sikap moral yaitu sikapnya yang didorong oleh pengetahuan dan kesadaran sosial bahwa pengetahuan yang hendak diproduksinya memiliki konsekuensi etis bagi keutuhan bangsa. Di samping itu, dorongan moralitas agama, sosial, dan norma-norma lainnya yang inheren di dalam Pancasila menjadi penentu perilaku moral peserta didik. Perilaku moral inilah yang merupakan pengejawantahan karakter “Manusia Pancasila” serta penguatan ontologi monodualis sebagai kodrat manusia.

Implementasi “Manusia Pancasila” dalam rancangan kerja Penguatan Pendidikan Karakter berada pada tahap formulasi dan evaluasi kebijakan pendidikan

pada level sekolah baik formal maupun non-formal dan kebijakan pada level pemerintah yang terwakilkan oleh otoritas pendidikan seperti kementerian pendidikan dan kebudayaan. Formulasi dan evaluasi kebijakan pada level pemerintah sangat menentukan keberhasilan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) baik pada pendidikan formal maupun non-formal. Berikut skema kerangka kerja yang dimaksud di atas.



Dengan demikian, kesadaran bahwa Pancasila adalah nafas Pendidikan Karakter seharusnya dimiliki oleh pemangku kebijakan (*policy maker*) beserta *stakeholder* pendidikan yang terlibat. Manifestasi dari kesadaran ini salah satunya dapat dilihat pada adanya perbaikan sistem birokrasi pendidikan dan pembenahan arah serta tujuan pendidikan nasional yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan neo-liberal

saja namun juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan yang meliputi spiritualitas, sosialitas, dan mentalitas bangsa. Dengan demikian Penguatan Pendidikan Karakter akan benar-benar berdampak pada seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barber, M., & Jackson, S. (2015). ‘Knowledge Making’: Issues in Modelling Local and Indigenous Ecological Knowledge. *Human Ecology*, 43(1), 119–130. <https://doi.org/10.1007/s10745-015-9726-4>
- Bogart, L. M., Wagner, G., Galvan, F. H., & Banks, D. (2010). Conspiracy beliefs about HIV are related to antiretroviral treatment nonadherence among african american men with HIV. *Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes (1999)*, 53(5), 648–655. <https://doi.org/10.1097/QAI.0b013e3181c57dbc>
- Collin, F., & Pedersen, D. B. (2015). The Frankfurt School, Science and Technology Studies, and the Humanities. *Social Epistemology*, 29(1), 44–72. <https://doi.org/10.1080/02691728.2013.782588>
- Cuaton, G. P., & Su, Y. (2020). Local-indigenous knowledge on disaster risk reduction: Insights from the Mamanwa indigenous peoples in Basey, Samar after Typhoon Haiyan in the Philippines. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 48, 101596. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2020.101596>
- Ellen, R. (n.d.). From Ethno-Science to Science, or “What the Indigenous Knowledge Debate Tells Us about How Scientists Define Their Project.” *Journal of Cognition and Culture*, 4(3–4), 409–450.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/1568537042484869>
- Imhoff, R., & Lamberty, P. (2020). A Bioweapon or a Hoax? The Link Between Distinct Conspiracy Beliefs About the Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak and Pandemic Behavior. *Social Psychological and Personality Science*, 11(8), 1110–1118.  
<https://doi.org/10.1177/1948550620934692>
- Indonesia, M. P. dan K. R. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal*.
- Kaelan. (2009). *Filsafat Pancasila (Pandangan Hidup Bangsa Indonesia)*. Paradigma.
- Latif, Y. (2015). *Revolusi Pancasila*. Penerbit Mizan.
- Lepofsky, D. (2009). The Past, Present, and Future of Traditional Resource and Environmental Management. *Journal of Ethnobiology*, 29(2), 161–166.  
<https://doi.org/10.2993/0278-0771-29.2.161>
- Marchand, T. H. J. (2010). Preface. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 16(s1), Siii–Sv.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2010.01606.x>
- Marcuse, H. (2007). *One-Dimensional Man*. Routledge Classics.
- Merriam-Webster. (n.d.). Retrieved April 15, 2021, from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/hoax#other-words>
- Notonagoro. (1995). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- PSP UGM dan Yayasan TIFA. (2008). Keadilan Sosial, Revolusi Berdasarkan Pancasila (Amanat Presiden Soekarno Pada Penutupan Seminar Pancasila di Gedung Negara Yogyakarta Tanggal 20 Februari 1959). In *Pancasila Dasar Negara (Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila)*. PSP UGM dan Yayasan TIFA.
- Reeve, D. (2012). Preparation for Practice: Can Philosophy Have a Place in Helping Students Incorporate the Social Model of Disability Within Their Praxis? *Social Work Education*, 31(2), 227–234.  
<https://doi.org/10.1080/02615479.2012.644966>
- Robbins, P. (2003). Beyond Ground Truth: GIS and the Environmental Knowledge of Herders, Professional Foresters, and Other Traditional Communities. *Human Ecology*, 31(2), 233–253.  
<https://doi.org/10.1023/A:1023932829887>
- Soekarno. (1958). *Pantha-Sila sebagai Dasar Negara, Jilid I, II, III*. Kementerian Penerangan RI.
- Swinburne, R. (2018). Cartesian Substance Dualism. In J. J. Loose, A. J. L. Menuge, & J. P. Moreland (Eds.), *The Blackwell Companion to Substance Dualism*. Oxford: Wiley Blackwell.
- van Prooijen, J.-W., & Douglas, K. M. (2017). Conspiracy theories as part of history: The role of societal crisis situations. *Memory Studies*, 10(3), 323–333.  
<https://doi.org/10.1177/1750698017701615>
- Wahyudi, A. (2010). Studies of Pancasila: Balancing Teleology and Deontology? In F. Dhont, K. Ko, M. C. Hoadley, & T. J. Connors (Eds.), *Pancasila's Contemporary Appeal: Re-legitimizing Indonesia's Founding Ethos*.

Yogyakarta: Yale Indonesian Forum & Indonesia History Studies Centre, Sanata Dharma University.

Watloly, A. (2016). *Sosio-epistemologi: Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial*. Penerbit Kanisius.